BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1 Kondisi Geografis

2.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Halmahera Selatan secara astronomis terletak diantara 126º 45” BT sampai 129º 30”BT dan 0º 30”LU sampai 2º 00”LS dan secara geografis dibatasi :

1. Sebelah Utara dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
2. Sebelah Selatan dengan Laut Seram
3. Sebelah Timur dengan Laut Halmahera
4. Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.263,72 Km^2, terdiri dari luas lautan 31.484,40 Km^2 (78%) dan luas daratan 8.779, 32 Km^2 (22%), dan secara administratif terdiri dari 30 kecamatan dan 249 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berada di Pulau Obi, Pulau Bacan, dan Bagian Selatan Pulau Halmahera. Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 371 pulau dan diantara pulau-pulau tersebut hanya 41 pulau yang berpenghuni. Sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan berdiam di wilayah pantai/pesisir yakni sebanyak 95%, sedangkan 5% sisanya berdiam di daerah pedalaman, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1

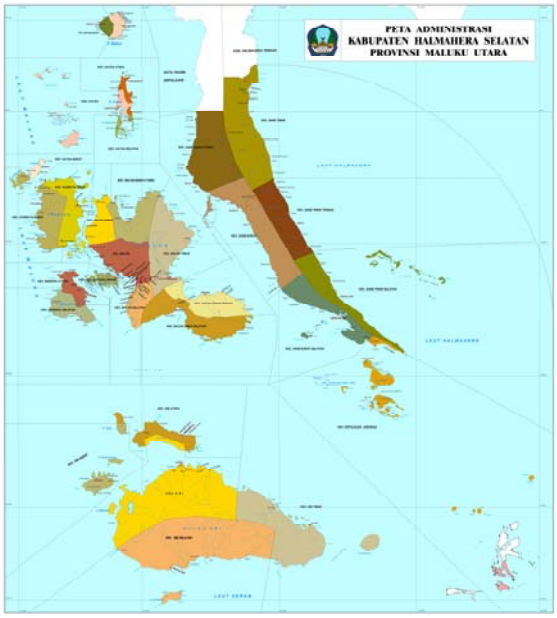

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Selatan

2.1.1.2 Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil digitasi CITRA LANDSAT Tahun 2006 – 2007 diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri :

1. Hutan, meliputi hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder. Hutan lahan kering sekunder ini tersebar dan merupakan dominasi penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan hutan lahan kering primer hanya terdapat di Pulau Bacan (Kecamatan Bacan Barat Utara dan Bacan Timur) dan di Pulau Obi (Kecamatan Obi dan Obi Selatan)
2. Pertanian terdiri dari pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering sekunder yang tersebar di seluruh wilayah dan pulau di Kabupaten Halmahera Selatan dengan persebaran di daerah pesisir pulau.
3. Permukiman yang berkembang dan tersebar di pesisir pulau di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Daerah Transmigrasi terdapat di Kecamatan Gane Barat Utara dan Gane Timur.
5. Lahan terbuka, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Semak belukar, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Savana, tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
8. Danau dengan danau terbesar di pulau Obi.
9. Rawa dengan luas terbesar di Kecamatan Gane Timur.
10. *Mangrove*, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

Penggunaan lahan atau pemanfaatan lahan (land use) merupakan aktivitas kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk keberlangsungan hidupnya. Luasan tipe penggunaan lahan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat disajikan kedalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Km^2)
1	Mangrove	204,13
2	Pemukiman	28,51
3	Transmigrasi	22,63
4	Hutan Lahan kering primer	456,70
5	Pertanian Lahan kering	155,53
6	Pertanian lahan kering bercampur	1.057,75
7	Savana	184,93
8	Semak/belukar	812,78
9	Danau	13,95
10	Rawa	4,74
11	Tanah Terbuka	25,28
12	Tertutup awan	557,79

Sumber : RTRW Kab. Halmahera Selatan, 2009

2.1.1.3 Topografi

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki daerah landai yang cukup luas. Berdasarkan kondisi fisiknya, luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan kelerengan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Luas Daerah berdasarkan Tingkat Kelerengan

No	Kelerengan	Derajat Kemiringan	Luas (Km^2)
1	Datar-Landai	0 – 08%	4,615.55
2	Agak bergelombang	08 – 15%	861.47
3	Bergelombang	15 – 25%	1,420.33
4	Curam	25 – 40%	956.80
5	Sangat Curam	> 40%	208.45

Sumber : RTRW Halmahera Selatan

Kecamatan yang memiliki mayoritas wilayah dengan tingkat kemiringan dari datar ke landai (0-2)º adalah :

1. Kec. Kayoa
2. Kec. Kayoa Utara
3. Kec. Kayoa Selatan
4. Kec. Gane Timur
5. Kec. Gane Timur Tengah
6. Kec. Gane Timur Selatan
7. Kec. Kepulauan Joronga
8. Kec. Kepulauan Batanglomang
9. Kec. Mandioli Utara
10. Kec. Mandioli Selatan
11. Kec. Obi Utara
12. Kec. Obi Timur

Kecamatan yang memiliki kondisi wilayah dengan derajat kemiringan curam-sangat curam (15 - >40) º adalah :

1. Kec. Makian
2. Kec. Makian Barat
3. Kec. Gane Barat Utara
4. Kec. Gane Barat
5. Kec. Gane Barat Selatan
6. Kec. Bacan Timur
7. Kec. Bacan Selatan
8. Kec. Bacan Timur Selatan

9. Kec. Obi
10. Kec. Obi Selatan

2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya tiap Kecamatan secara umum terdiri dari :

1. Jenis tanah *Podsolik* Merah Kuning terdapat di Obi Bagian Timur dan Pulau Kayoa
2. Jenis tanah Kompleks di Obi Bagian Tengah
3. Jenis Tanah *Latosol* terdapat di Gane Timur, Gane Barat, Bacan
4. Jenis Tanah *Reguosol* yang terdapat di Pulau Makian dan Pulau Obi di pesisir Utara
5. Jenis Tanah *Alluvial* terdapat Pulau Obi Bagian Barat

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi (kondisi air permukaan dan air tanah) Kabupaten Halmahera Selatan dipengaruhi oleh iklim, curah hujan serta keberadaan sungai dan danau. Berdasarkan keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah teridentifikasi, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 151 DAS dan 5 buah danau (dengan 4 danau besar yang terdapat di Kec. Gane Timur, Kec. Bacan Timur dan Kec. Obi).

Sementara kondisi hidrogeologi di Kabupaten Halmahera Selatan dibagi atas beberapa tipologi kondisi hidrogeologi yaitu berdasarkan tipologi produktifitas aquifernya yang terdiri atas :

1. <u>Produktif</u> : Setempat, akuifer produktif (Akuifer dengan keterusan beragam; umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah; debit mata air umumnya < 10 l/det).
2. <u>Produktif rendah setempat</u> : Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti (Umumnya keterusan sangat rendah) setempat air tanah dangkal dalam jumlah yg terbatas dapat di peroleh di lembah-lembah atau pada zona pelapukan.
3. <u>Produktif sedang</u> : Akuifer produksi sedang (Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, & saluran pelarutan. Debit sumur & mata air beragam dalam kisaran besar. Debit mata air terbesar mencapai 100 l/det).
4. <u>Setempat produktif sedang</u> : Setempat akuifer dengan produktivitas sedang (Akuifer tidak menerus, tipis, dan rendah keterusannya, muka air tanah umumnya dangkal, debit sumur umumnya < 5 l/det).
5. <u>Tidak produktif dangkal</u> : Daerah air tanah langka atau tak berarti Kabupaten Halmahera Selatan sebagian besar wilayahnya memiliki produktifitas aquifer rendah setempat. Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki produktifitas aquifer tinggi terdapat di Pulau Makian.

2.1.1.6 Kondisi Geologi

Gambaran umum mengenai kondisi geologi, jenis batuan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai komposisi yang sangat bervariasi, dimana terdiri dari batuan beku, *sediment* dan *metamorf*, karakteristik dan persebaran batuannya tertentu sesuai dengan daerah pembentukannya seperti batuan beku di sebagian Pulau Makian sebagai hasil dari erupsi Gunung Kie Besi, Batuan Sedimen di Pulau Kayoa, Batuan Residual di sebagian Pulau Obi serta Batuan *Skiss Metamorf* di sebagian Pulau Bacan.

Tekstur tanah adalah perbandingan ukuran partikel-partikel kandungan tanah antara debu, tanah liat dan pasir dari satu contoh tanah. Tekstur berpengaruh langsung terhadap unsur hara, drainase dan kepekaan terhadap erosi. Juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah, persediaan dan kecepatan peresapan air di daerah tersebut, dimana hal itu sangat berperan dalam mudah tidaknya lapisan tanah diolah. Definisi tekstur dapat diartikan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara Kualitatif, yaitu menggambarkan halus, sedang dan kasar sedangkan secara kuantitatif tekstur ini menggambarkan susunan relatif berat fraksi-fraksi yaitu pasir, debu dan tanah liat. Berdasarkan data struktur geologi, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tersusun atas 20 jenis batuan. Rincian jenis batuan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jenis Batuan di Lahan Kabupaten Halmahera Selatan

No	Jenis Batuan	Luas (Km^2)
1	Alluvium	1,010.92
2	Batuan Gunung Api *Holosen*	159.60
3	Batuan Gunung Api *Neogen*	148.70
4	Batuan Gunung Api *Oligo-Miosen*	1,648.94
5	Batuan Gunung Api *Plio-Plistosen*	44.07
6	Batuan Malihan	11.17
7	Batuan Terobosan	2.19
8	Batuan *Ultramafik*	397.60
9	Batu Gamping Terumbu	830.34
10	Formasi Anggai	200.40
11	Formasi Bacan	775.76
12	Formasi Fluk	94.55
13	Formasi Kayasa	7.06
14	Formasi Loleobasso	45.15
15	Formasi Obi	288.02
16	Formasi Woi	454.44
17	Komplek Malihan	262.52
18	Sediment Klastik *Miosen*	348.91
19	Sediment Klastik *Neogen*	1,365.00
20	Terobosan Tersier	42.25
21	Tidak Ada Data	48.72

Sumber : RTRW Halmahera Selatan

2.1.1.7 Struktur Geologi

Struktur lipatan berupa sinklin dan antiklin terlihat jelas pada Formasi Weda yang berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal. Sumbu lipatan berarah Utara – Selatan, Timur Laut - Barat Daya dan Barat Laut - Tenggara. Struktur sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik; umumnya berarah Utara-Selatan dan Barat Laut-Tenggara.

Petunjuk akan adanya banyak sesar di Pulau Bacan diperoleh baik dari hasil pengamatan di lapangan maupun pada potret udara. Sesar diduga terdapat di sepanjang Sungai Sayoang yang mengalir dari baratlaut ke tenggara dan memisahkan daerah perbukitan bagian timur dan barat Pulau Bacan bagian utara. Pada jalur sesar tersebut muncul batuan terobosan granit/*granodiorit* berumur tersier dan batuan gunungapi berumur kuartet.

Berdasarkan peta patahan dapat diketahui sebaran garis sesar di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Garis patahan yang tersebar dapat digolongkan berdasarkan jenis dan proses pembentuknya yaitu seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jenis Patahan Beserta Jumlah dan Panjang Garis Sesarnya di Kabupaten Halmahera Selatan

No	Jenis	Jumlah	Panjang	
			Meter	Km
1	Antiklin	9	86,974	86.97
2	Gunung api giat	1	23,183	23.18
3	Kontak geologi	2	14,406	14.41
4	Sesar	36	269,701	269.70
5	Sesar Normal	7	118,683	118.68

Sumber : RTRW Halmahera Selatan)

2.1.1.8 Klimatologi

Karakteristik iklim wilayah Kabupaten Halmahera Selatan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 1.000 mm sampai dengan 2.000 mm. Curah hujan ini hampir merata di Pulau Bacan dan sekitarnya, Pulau Obi dan sekitarnya, dan Halmahera bagian Selatan.

Kabupaten Halmahera Selatan juga dipengaruhi oleh dua musim yaitu:

1. Musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan Pancaroba pada bulan April.
2. Musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan Pancaroba pada bulan Oktober.

Iklim merupakan perubahan alam untuk jangka waktu yang lama, dan umumnya iklim sangat sulit dikontrol oleh perlakuan manusia. Selama tahun 2009 iklim Kabupaten

Hamahera Selatan dapat diamati menurut suhu udara, curah hujan, kecepatan angin dan kelembaban udara yang tercantum dalam Tabel 2.5

Tabel 2.5 Kondisi Iklim di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

BULAN	Suhu Udara Rata-rata (ºC)	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Kecepatan Angin Rata-rata (knot)	Kelembaban Udara (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	26,3	231	17	2	84
Februari	26,4	269	18	2	80
Maret	25,6	285	19	2	85
April	26,3	246	18	2	84
Mei	26,4	315	17	2	85
Juni	25,7	163	13	2	86
Juli	25,5	72	12	3	85
Agustus	25,7	85	10	3	85
September	26,5	4	5	3	79
Oktober	29,3	22	8	3	79
November	26,8	289	18	2	82
Desember	26,6	136	9	2	82

Sumber : Halmahera Selatan Dalam Angka, 2010

Kabupaten Halmahera Selatan menurut klasifikasi Schmidt F.H dan J.H.A Ferguson (1951) secara umum beriklim Tipe A dan Tipe B kecuali Saketa yang bertipe C. Menurut Klasifikasi Koppen (1960) Kabupaten Halmahera Selatan bertipe A kecuali Laiwui yang bertipe Am.

Berdasarkan tingkat curah hujan 1.250 – 3.250 mm/tahun dengan sebaran curah hujan mayoritas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 2.250 mm/tahun dan curah hujan tertinggi yaitu 3.250 mm/tahun terjadi pada dataran tinggi di Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Kec. Obi Selatan.

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan dan kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan, dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah yang telah dijelaskan di atas dengan potensi pengembangan wilayah disajikan pada Gambar 2.2.

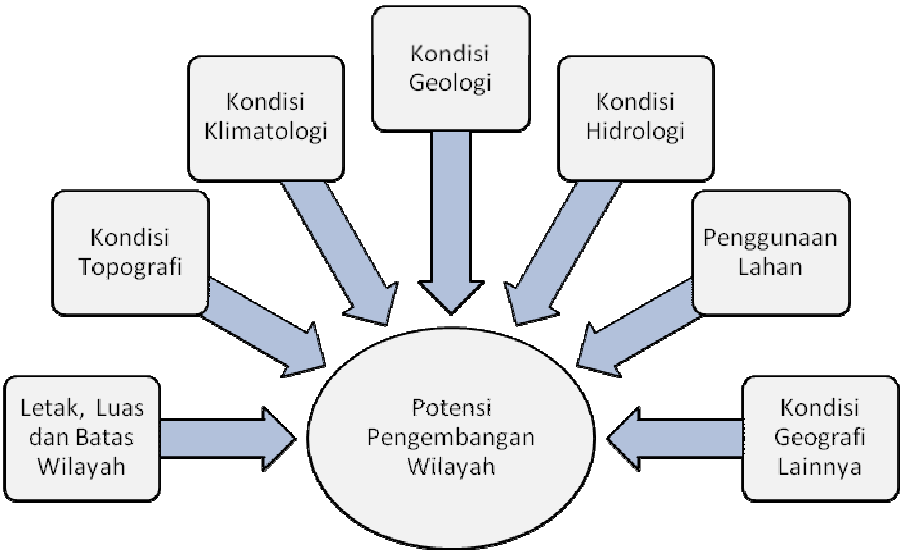

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sesuai draft RTRW Kabupaten Halmahera Selatan 2011-2031 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi :
   1) Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan perkotaan Labuha di Kecamatan Bacan.
   2) Pusat Kegiatan Lokal terdiri atas:
      (1) kawasan perkotaan Gurapin di Kecamatan Kayoa,
      (2) kawasan perkotaan Maffa di Kecamatan Gane Timur,
      (3) kawasan perkotaan Saketa di Kecamatan Gane Barat, dan
      (4) kawasan perkotaan Babang di Kecamatan Bacan Timur.
   3) Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas:
      (1) kawasan perkotaan Laiwui di Kecamatan Obi,
      (2) kawasan perkotaan Loleojaya di Kecamatan Kasiruta Timur,
      (3) kawasan perkotaan Kukupang di Kecamatan Kepulauan Joronga,
      (4) kawasan perkotaan Waikyon di Kecamatan Makian.
   4) Pusat Pelayanan Lokal terdiri atas:
      (1) kawasan perkotaan Indari di Kecamatan Bacan Barat,
      (2) kawasan perkotaan Yaba di Kecamatan Bacan Barat Utara,
      (3) kawasan perkotaan Mandaong di Kecamatan Bacan Selatan,
      (4) kawasan perkotaan Wayaua di Kecamatan Bacan Timur Selatan,
      (5) kawasan perkotaan Bibinoi di Kecamatan Bacan Timur Tengah,
      (6) kawasan perkotaan Gane Dalam di Kecamatan Gane Barat Selatan,
      (7) kawasan perkotaan Dolik di Kecamatan Gane Barat Utara,
      (8) kawasan perkotaan Gane Luar di Kecamatan Gane Timur Selatan,

(9) kawasan perkotaan Bisui di Kecamatan Gane Timur Tengah,
(10) kawasan perkotaan Palamea di Kecamatan Kasiruta Barat,
(11) kawasan perkotaan Bajo di Kecamatan Kepulauan Batanglomang,
(12) kawasan perkotaan Busua di Kecamatan Kayoa Barat,
(13) kawasan perkotaan Laluin di Kecamatan Kayoa Selatan,
(14) kawasan perkotaan Laromabati di Kecamatan Kayoa Utara,
(15) kawasan perkotaan Mataketen di Kecamatan Makian Barat,
(16) kawasan perkotaan Jiko di Kecamatan Mandioli Selatan,
(17) kawasan perkotaan Indong di Kecamatan Mandioli Utara,
(18) kawasan perkotaan Jikohai di Kecamatan Obi Barat,
(19) kawasan perkotaan Wayaloar di Kecamatan Obi Selatan,
(20) kawasan perkotaan Sum di Kecamatan Obi Timur,
(21) kawasan perkotaan Madapolo di Kecamatan Obi Utara

2. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang terdiri dari :

1) Kawasan Lindung di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas :

(1) Kawasan resapan air ditetapkan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

(2) Kawasan suaka alam terdiri atas Kawasan Cagar Alam Gunung Sibela di Kecamatan Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, seluas 20.187 ha; Kawasan Cagar Alam di Kecamatan Obi dan Obi Selatan, seluas 37.226 ha; serta Kawasan Cagar Alam Taman Laut Kepulauan Widi di Kecamatan Gane Timur Selatan, seluas 2.531 ha.

Kawasan Lindung yang tersebar di 30 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luasan yang berbeda dengan kawasan hutan lindung terbesar pada Kecamatan Mandioli utara dan yang terkecil pada Kecamatan Kayoa Utara. Kondisi kawasan hutan lindung dapat disajikan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Halmahera Selatan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Gane Barat Utara	14.564
2	Gane Timur	5.083
3	Bacan	136
4	Bacan Barat	1.054
5	Bacan Barat Utara	7.968
6	Bacan Timur	4.706
7	Bacan Timur Selatan	3.027
8	Bacan Timur Tengah	6.393
9	Gane Barat	12.181
10	Gane Barat Selatan	2.931
11	Gane Timur Selatan	2.537
12	Gane Timur Tengah	1.758

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
13	Kasiruta Barat	6.080
14	Kasiruta Timur	13.384
15	Kayoa	4.358
16	Kayoa Barat	656
17	Kayoa Selatan	217
18	Kayoa Utara	2
19	Kepulauan Batanglomang	2.018
20	Kepulauan Joronga	8.126
21	Makian	4.062
22	Makian Barat	3.025
23	Mandioli Selatan	7.557
24	Mandioli Utara	6.153
25	Obi	17.344
26	Obi Barat	3.548
27	Obi Selatan	14.977
28	Obi Timur	4.034
29	Obi Utara	11.577
Jumlah		**169.456**

Sumber : RTRW Kab. Halmahera Selatan 2011-2031

(3) Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di Kecamatan Gane Timur seluas 191 ha, Kecamatan Bacan seluas 276 ha, Kecamatan Bacan Barat seluas 646 ha, Kecamatan Bacan Timur seluas 567 ha, Kecamatan Bacan Timur Selatan seluas 212 ha, Kecamatan Bacan Timur Tengah seluas 433 ha, Kecamatan Gane Barat Selatan seluas 904 ha, Kecamatan Gane Timur Selatan seluas 163 ha, Kecamatan Kasiruta Barat seluas 67 ha, Kecamatan Kasiruta Timur seluas 345 ha, Kecamatan Kayoa seluas 876 ha, Kecamatan Kayoa Barat seluas 16 ha, Kecamatan Kayoa Selatan seluas 402 ha, Kecamatan Kayoa Utara seluas 29 ha, Kecamatan Kepulauan Batanglomang seluas 367 ha, Kecamatan Kepulauan Joronga seluas 832 ha, Kecamatan Mandioli Selatan seluas 453 ha, Kecamatan Mandioli Utara seluas 226 ha, Kecamatan Obi seluas 885 ha, Kecamatan Obi Barat seluas 794 ha, Kecamatan Obi Selatan seluas 31 ha, Kecamatan Obi Timur seluas 1.586 ha, dan Kecamatan Obi Utara seluas 440 ha.

(4) Kawasan konservasi perairan tersebar di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan.

(5) Kawasan rawan bencana meliputi (1) kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Bacan Selatan; (2) Kawasan rawan letusan gunung api berlokasi di Pulau Makian (Gunung Kie Besi); (3) Kawasan rawan longsor berlokasi di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur Tengah; dan (4) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami berlokasi di seluruh wilayah kabupaten.

(6) Kawasan Lindung lainnya yaitu perlindungan terumbu karang berlokasi menyebar di Kecamatan Gane Timur, Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, dan Obi Utara. Adapun zona Kawasan Lindung dapat dilihat pada Gambar 2.3

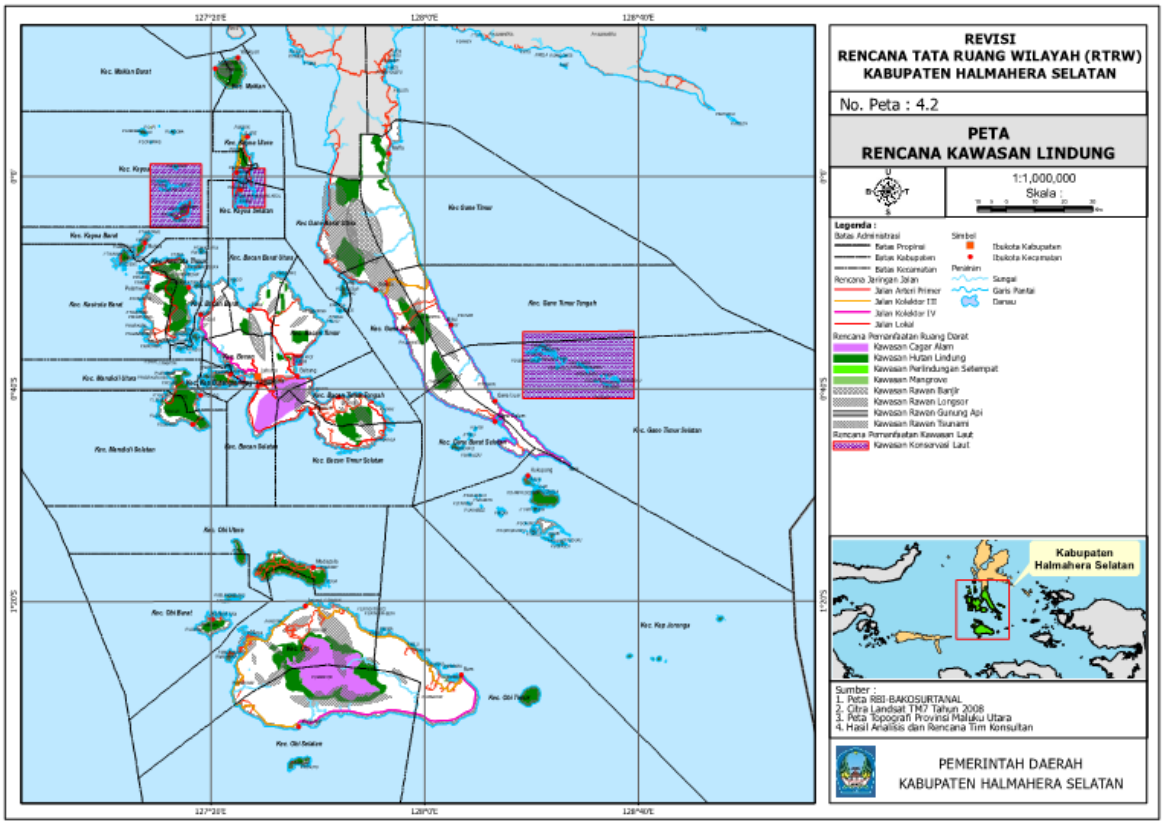

Gambar 2.3. Peta Zona Kawasan Lindung

2) Kawasan Budidaya di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas :

(1) Kawasan hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan Gane Barat Utara, Gane Timur, Bacan, Bacan Barat, Bacan Barat Utara, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Gane Barat, Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Kasiruta Barat, Kasiruta Timur, Kayoa, Kayoa Barat, Kayoa Selatan, Kayoa Utara, Kepulauan Batanglomang, Kepulauan Joronga, Makian, Makian Barat, Mandioli Selatan, Mandioli Utara, Obi, Obi Barat, Obi Selatan, Obi Timur, dan Obi Utara dengan luas kurang lebih 134.300 ha.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Gane Barat Utara, Gane Timur, Bacan, Bacan Barat, Bacan Barat Utara, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Gane Barat, Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Kasiruta Barat, Kasiruta

Timur, Kayoa, Kayoa Barat, Kayoa Selatan, Kayoa Utara, Kepulauan Batanglomang, Kep Joronga, Makian, Makian Barat, Mandioli Selatan, Mandioli Utara, Obi, Obi Barat, Obi Selatan, dan Obi Timur dengan luas kurang lebih 77.303 ha.

(3) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah terdapat di Kecamatan Bacan Barat Utara seluas 398 ha, Kecamatan Bacan Timur Tengah seluas 160 ha, Kecamatan Gane Barat Selatan seluas 7.358 ha, Kecamatan Gane Timur Selatan seluas 10.583 ha, Kecamatan Kayoa Utara seluas 1.275 ha, Kecamatan Kepulauan Joronga seluas 1.316 ha, dan Kecamatan Makian seluas 699 ha.

(4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dikembangkan di Kecamatan Gane Barat Utara seluas 943 ha, Kecamatan Bacan seluas 798 ha, Kecamatan Bacan Barat seluas 87 ha, Kecamatan Bacan Selatan seluas 135 ha, Kecamatan Bacan Timur seluas 259 ha, Kecamatan Bacan Timur Selatan seluas 546 ha, Kecamatan Bacan Timur Tengah seluas 1.897 ha, Kecamatan Gane Barat seluas 1.095 ha, Kecamatan Kasiruta Barat seluas 163 ha, Kecamatan Kasiruta Timur seluas 144 ha, Kecamatan Makian seluas 32 ha, Kecamatan Mandioli Selatan seluas 1.400 ha, Kecamatan Mandioli Utara seluas 20 ha, Kecamatan Obi seluas 703 ha, Kecamatan Obi Selatan seluas 249 ha, Kecamatan Obi Timur seluas 2.479 ha, dan Kecamatan Obi Utara seluas 2.073 Ha.

(5) Kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Gane Barat Utara seluas 13.054 ha, Kecamatan Gane Timur seluas 39.535 ha, Kecamatan Bacan seluas 11.389 ha, Kecamatan Bacan Barat seluas 3.282 ha, Kecamatan Bacan Barat Utara seluas 734 ha, Kecamatan Bacan Selatan seluas 3.940 ha, Kecamatan Bacan Timur seluas 15.319 ha, Kecamatan Bacan Timur Selatan seluas 14.976 ha, Kecamatan Bacan Timur Tengah seluas 9.168 ha, Kecamatan Gane Barat seluas 10.911 ha, Kecamatan Gane Barat Selatan seluas 8.647 ha, Kecamatan Gane Timur Selatan seluas 11.450 ha, Kecamatan Gane Timur Tengah seluas 17.519 ha, Kecamatan Kasiruta Barat seluas 7.460 ha, Kecamatan Kasiruta Timur seluas 6.651 ha, Kecamatan Kayoa seluas 957 ha, Kecamatan Kayoa Barat seluas 945 ha, Kecamatan Kayoa Selatan seluas 1.254 ha, Kecamatan Kayoa Utara seluas 60 ha, Kecamatan Kepulauan Batanglomang seluas 1.615 ha, Kecamatan Kepulauan Joronga seluas 1.536 ha, Kecamatan Mandioli Selatan seluas 2.600 ha, Kecamatan

Mandioli Utara seluas 2.094 ha, Kecamatan Obi seluas 25.854 ha, Kecamatan Obi Barat seluas 2.866 ha, Kecamatan Obi Selatan seluas 34.894 ha, dan Kecamatan Obi Timur seluas 27.726 Ha.

(6) Kawasan peternakan dikembangkan di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Gane Timur, dan Kecamatan Gane Barat;

(7) Kawasan perikanan terdiri atas :

a. Kawasan minapolitan terdapat di kawasan minapolitan Labuha, kawasan minapolitan Panambuang, kawasan minapolitan Jikotamo, serta kawasan minapolitan Ngofakiaha.

b. Kawasan perikanan tangkap terdapat di wilayah perairan sebelah timur, dengan potensi perikanan utama adalah ikan tuna, ikan cakalang, dan lobster terdapat di Kecamatan Gane Timur, Gane Timur Tengah, dan Gane Timur Selatan; Wilayah perairan sebelah selatan, dengan potensi perikanan utama adalah ikan tuna dan ikan cakalang berlokasi di perairan sekitar Kecamatan Obi Selatan dan Obi Timur; wilayah perairan barat dengan potensi perikanan utama adalah ikan tuna, ikan cakalang, ikan kakap, lobster dan ikan kerapu berlokasi di perairan sekitar Kecamatan Kasiruta Barat dan Kayoa Barat; dan wilayah perairan sebelah utara dan barat dengan potensi perikanan utama adalah ikan cakalang, ikan tuna,ikan kakap,dan ikan kerapu,berlokasi di sekitar perairan Kecamatan Makian dan Makian Barat.

c. Kawasan budidaya perikanan seperti pengembangan keramba jaring apung (KJA), budidaya rumput laut, dan mutiara.

(8) Kawasan pertambangan meliputi :

a. Kawasan pertambangan mineral di kawasan Bacan, yaitu pada Kecamatan Bacan, Bacan Barat dan Bacan Timur; kawasan Obi, yaitu pada Kecamatan Obi dan Obi Selatan, Obi Timur, Obi Barat dan Obi Utara. Kawasan pertambangan batubara terdapat di kawasan Bacan, yaitu pada Kecamatan Bacan, Bacan Barat dan Bacan Timur; dan kawasan Obi, yaitu pada Kecamatan Obi dan Obi Selatan, Obi Timur, Obi Barat dan Obi Utara;

b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di kawasan perairan laut halmahera pada Kecamatan Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Gane Barat Selatan;

c. Kawasan pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Bacan Timur Tengah.

(9) Kawasan peruntukan industri meliputi :

a. Kawasan industri sedang terdiri atas industri pengolahan rumput laut di Kecamatan Obi dan Kecamatan Kepulauan Joronga, industri pengolahan beras di Kecamatan Gane Timur, industri pengolahan kakao dan kelapa di Babang, dan industri pengolahan kakao di Kecamatan Obi Utara, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Barat

b. Kawasan industri kecil terdiri atas industri pengolahan gula aren, olahan sagu dan kerupuk ikan di Kecamatan Bacan.

(10) Kawasan pariwisata terdiri dari :

a. Kawasan pariwisata budaya dengan jenis wisata :

a) Tarian Lalayon berlokasi di Kecamatan Obi dan Kec. Gane Timur;

b) Tarian Cakalele berlokasi di Kecamatan Obi dan Kec. Obi Selatan;

c) Tarian Gala/ Rongeng berlokasi di Kecamatan Bacan;

d) Tarian Togal berlokasi di Pulau Makian dan Kayoa;

e) Gua Pantai Rijang berlokasi di Kecamatan Obi Selatan;

f) Benteng Barnavelt berlokasi di Kecamatan Bacan;

g) Keraton Bima berlokasi di Kecamatan Bacan;

h) Masjid dan Kuburan Sultan di Kecamatan Bacan;

i) Keraton Kosdan berlokasi di Kecamatan Kasiruta Barat;

j) Benteng Foya berlokasi di Kecamatan Gane Timur;

k) Benteng Waidoba berlokasi di Kecamatan Kayoa; dan

l) Benteng Mouriet berlokasi di Pulau Makian.

b. Kawasan pariwisata alam meliputi :

a) Danau Karo kerlokasi di Kecamatan Obi;

b) Cagar Alam Gunung Sibela berlokasi di Kecamatan Bacan;

c) Kali Barangka Dolong berlokasi di Kecamatan Bacan;

d) Puncak Gunung Kie Besi berlokasi di Pulau Makian;

e) Pantai Pulau Sambiki berlokasi di Kecamatan Obi;

f) Pantai Akebaru berlokasi di Kecamatan Obi;

g) Taman Laut Pulau Nusantara berlokasi di Kecamatan Bacan;

h) Pantai Kupal berlokasi di Kecamatan Bacan;

i) Taman Laut Pulau Widi berlokasi di Kec. Gane Timur Selatan;

j) Pantai Laut Pulau Lelei berlokasi di Kecamatan Kayoa;

k) Pantai Pulau Guraici berlokasi di Kecamatan Kayoa; dan

l) Pantai Watambi berlokasi di Kecamatan Kayoa.

(11) Kawasan permukiman terdiri atas **:**

a. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan dengan total luas 970 ha yang dikonsentrasikan di setiap ibukota kecamatan,

b. Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan di kampung-kampung yang tersebar di seluruh kecamatan dengan total luas 7.501 ha.

c. Kawasan transmigrasi terdapat di Kecamatan Gane Barat seluas 834 ha dan Kecamatan Gane Timur seluas 1.012 ha.

(12) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan di pulau-pulau lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2.

(13) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana adalah kawasan pertahanan dan keamanan negara yang meliputi Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1509/Labuha di Kecamatan Bacan; Markas Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan; Markas Kepolisian Resort (Polres) Labuha di Kecamatan Bacan; Markas Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan; dan Pos Pengamat TNI-AL (Posal) Bacan di Kecamatan Bacan

2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu :

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Bacan Selatan;
2. Kawasan rawan letusan gunung api berlokasi di Pulau Makian (Gunung Kie Besi);
3. Kawasan rawan longsor berlokasi di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur Tengah; dan
4. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami berlokasi di seluruh wilayah kabupaten.

2.1.2 Kondisi Demografis

2.1.2.1 Kependudukan

Penduduk merupakan sumberdaya yang potensial bagi proses pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal bagi pelaksanaan pembangunan, namun dapat pula menjadi beban jika tidak tertangani secara serius sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial seiring dengan berkembangnya penduduk seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan sebagainya.

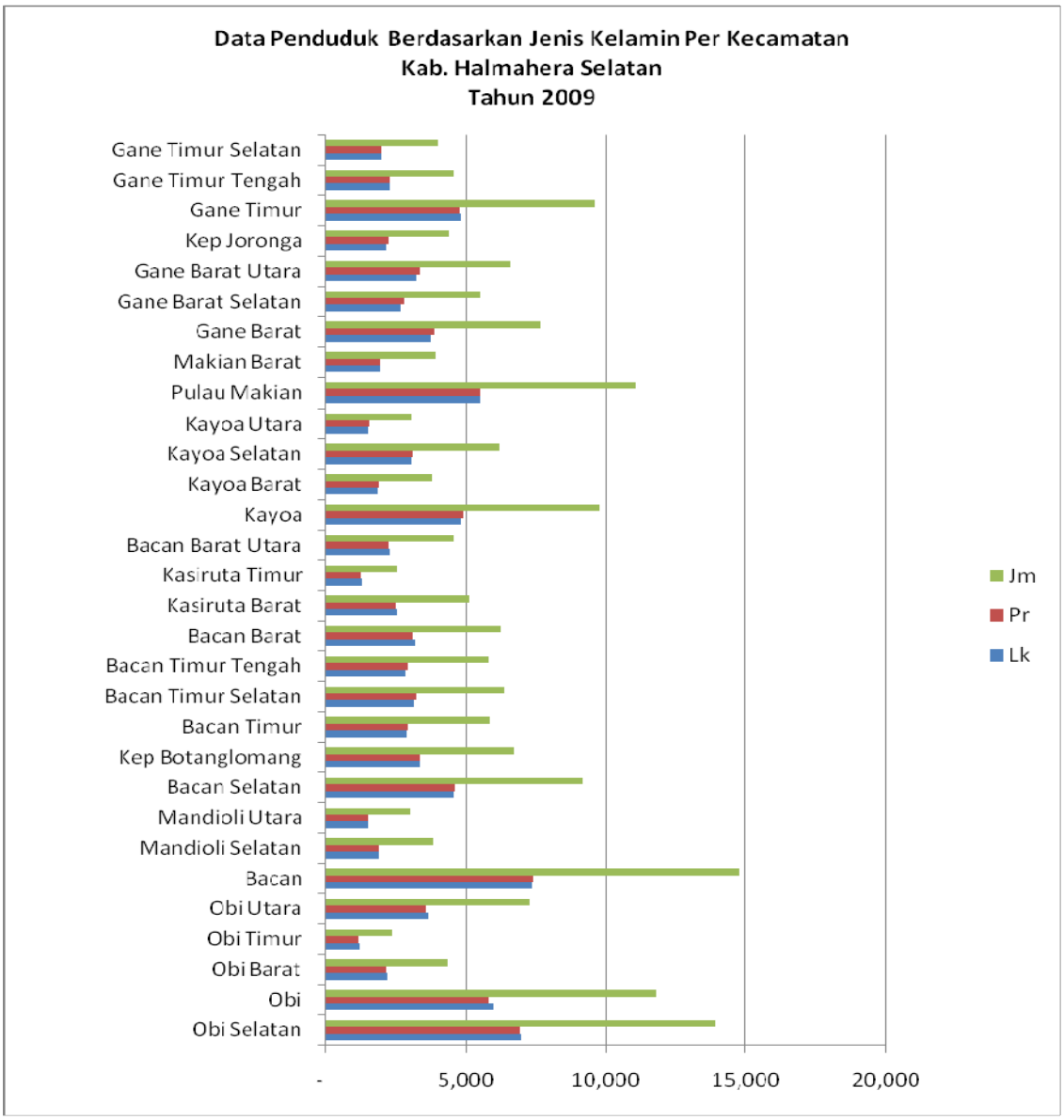

Gambar 2.4. Grafik Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan, penduduk berada pada dua sisi sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 berjumlah 194.712 jiwa, terdiri dari 97.212 laki-laki dan 97.500 perempuan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,35%. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, maka tingkat kepadatan penduduk Halmahera Selatan rata-rata 22 jiwa per Km^2, dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 170.685 jiwa, maka penduduk Halmahera Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 24.027 jiwa atau sebesar 14,00%.

Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bacan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.825 jiwa atau 7,61%, sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Obi Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 2.396 jiwa atau 1,23%.

2.1.2.2 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja, yaitu kelompok penduduk yang tersedia menawarkan jasa kerjanya pada tingkat upah dan kondisi perekonomian pada periode tertentu. Sedangkan permintaan tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah kesempatan kerja atau jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tertentu. Deviasi antara kedua indikator tersebut menghasilkan angka pengangguran terbuka yang tidak lain adalah jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 adalah sebesar 77.473 orang atau sekitar 67,00% dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sedangkan jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau tingkat pengangguran pada tahun 2009 sebesar 5%, lebih rendah dari tingkat pengangguran di Provinsi Maluku Utara yang sebesar 9,64%. Selengkapnya tentang kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2009 ditampilkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2009

No	Indikator	Satuan	Halmahera Selatan	Maluku Utara
1	Penduduk	Jiwa	194.712	959.598
2	Angkatan Kerja	Orang	77.473	414.827
3	Pengangguran	Orang	3.874	40.008
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67	55
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5	9,64

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Dari total penduduk usia kerja yang berstatus bekerja, sekitar 4% tidak berpendidikan, 55% berpendidikan SD/sederajat, 23% berpendidikan SMP/sederajat, 15% berpendidikan SMA/sederajat, dan 3% berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana). Sektor pertanian masih menjadi primadona, pada tahun 2009, lebih dari 70% penduduk bekerja di sektor pertanian, sektor manufaktur 13%, dan sektor jasa 9%.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi dalam jangka panjang adalah terjadinya transformasi struktural sehingga perekonomian terkonsentrasi pada sektor-sektor yang dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki daya saing (sektor basis, atau sektor kunci, atau sektor unggulan). Tidak semua sektor dalam suatu perekonomian memiliki kemampuan tumbuh yang sama, sehingga dibutuhkan spesialisasi untuk mendorong pertumbuhan rata-rata yang relatif tinggi. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi (spesialisasi) pada sektor-sektor strategis/unggulan akan sangat berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat berimbas terhadap akselerasi pertumbuhan secara simultan dan sinergis.

Suatu sektor ekonomi dapat dikatakan unggul apabila sektor tersebut memenuhi beberapa kriteria minimal, antara lain : 1) sektor tersebut merupakan sektor basis; 2) sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan jangka pendek yang dapat ditempuh adalah memperbaiki kebijakan pengupahan, namun hal itu juga perlu dikaitkan dengan kemampuan dunia usaha secara cermat. Adapun untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, perlu dirancang kebijakan yang secara lebih tajam mampu mencetak sumber daya manusia yang handal, baik sebagai buruh pekerja, maupun sebagai pelaku usaha atau pemilik modal.

Upaya-upaya untuk mentransformasi penduduk dan angkatan kerja Kabupaten Halmahera Selatan yang besar menjadi *man power* yang kompetitif, perlu dilakukan dengan sungguh-sunguh, antara lain dengan kebijakan mengutamakan pendidikan menengah kejuruan, pendidikan *life skill* di sekolah-sekolah umum, serta pendidikan diploma dan politeknik untuk level pendidikan tingginya. Demikian pula perlu membangun pusat-pusat pelatihan tenaga kerja sehingga setiap angkatan kerja yang akan memasuki pasar kerja di dalam maupun luar negeri dapat diserap dengan seoptimal mungkin.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah disektor pertanian, agar masyarakat yang bergelut di sektor

pertanian dapat menikmati peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan yang sepadan dengan jerih payahnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna peningkatan sektor pertanian adalah melalui diversifikasi usaha tani, pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian, hingga peningkatan akses petani kepada sektor hulu dan hilir pertanian, disamping penguasaan pada aspek budidayanya.

Sesungguhnya sektor pertanian Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun ke tahun juga mengalami pertumbuhan, hal itu nampak dari peningkatan PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku dari 210,423 miliar rupiah pada tahun 2005 menjadi 320,811 miliar rupiah pada tahun 2009, atau meningkat rata-rata sebesar 4,83 persen per tahun, namun jika dilihat dari proporsinya terhadap PDRB total sector pertanian mengalami penurunan dari 41,94 persen pada tahun 2005 menjadi 39,89 persen di tahun 2009. Hal ini menunjukan bahwa ada peningkatan hasil produksi sektor pertanian dari tahun ke tahun, namun terdapat perkembangan yang lebih besar pada sec\ktor lain penentu PDRB, sehingga persentase pertumbuhan menurun.

Komoditi utama pada sektor pertanian yang menonjol yaitu pada tanaman perkebunan, yang merupakan penyumbang terbesar stok produksi pertanian daerah dengan kontribusi sebesar 19,01% dengan total produksi pada tahun 2009 sebesar 101.459,25 juta rupiah. Komoditi lainnya adalah sayuran dan buah-buahan, komoditi perkebunan, komoditi peternakan (sapi, kambing dan unggas), serta komoditi perikanan.

Pembangunan perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sebagai penyumbang kedua terbesar PDRB di Kabupaten Halmahera Selatan. Pada tahun 2005 PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran atas Dasar Harga Konstan mencapai 105,28 miliar rupiah atau 24,65 persen dari total PDRB Kabupaten Halmahera Selatan, pada tahun 2009 meningkat menjadi 146,18 miliar rupiah atau 27,39 persen.

Selanjutnya untuk usaha kecil dan menengah, telah memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Di Kabupaten Halamahera Selatan peranan koperasi dan usaha kecil dalam perekonomian daerah mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kegiatan usaha koperasi, dimana jumlah koperasi pada tahun 2005 sebanyak 16 unit, naik menjadi 135 unit tahun 2009. Demikian pula jumlah modal usaha yang dikelola koperasi mengalami peningkatan, modal usaha koperasi pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.989.000.000,- menjadi Rp.8.108.379.000 (*modal* sendiri) pada tahun 2009. pada inetrval tahun tersebut jumlah anggota bertambah dari 480 menjadi 12.436 orang.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Sejalan dengan pemulihan kondisi ekonomi pada tingkat nasional maupun regional, perekonomian Halmahera Selatan telah tumbuh dengan angka rata-rata sebesar 5,33% per tahun selama kurun waktu tahun 2005-2009. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2009 mencapai 5,58%. Sektor dengan pertumbuhan *output* tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Perdagangan, hotel dan Restoran serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar 87,91%, 8,34% dan 7,93%. Sektor terendah adalah sektor listrik, Gas dan Air Bersih yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,45% per tahun.

Kumulatif konstribusi sektor PDRB atas harga konstan selama tahun 2005 sampai dengan 2009 sektor pertanian memegang penting dibandingkan sektor lainnya, sebaliknya sektor listrik, gas dan air bersih memiliki peranan yang sangat kecil terhadap PDRB selengkapnya konstribusi persektor dapat disajikan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2005 s.d 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sektor	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008*		Tahun 2009**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	166761,61	39,05	174213,19	38,7	179412,68	37,62	192390,46	38,07	195996,31	36,73
2	Pertambangan & penggalian	501,83	0,12	548,36	0,12	5012,77	1,05	6201,67	1,23	7323,66	1,37
3	Industri pengolahan	94123,4	22,04	98090,7	21,79	101195,63	21,22	100800,14	19,94	106679,61	19,99
4	Listrik,gas & air bersih	1373,67	0,32	1393,42	0,31	1267,69	0,27	1283,02	0,25	1341,25	0,25
5	Konstruksi	3203,3	0,75	3341,84	0,74	3562,28	0,75	3601,45	0,71	3699,72	0,69
6	Perdagangan, hotel & restoran	105276,61	24,65	114862,9	25,52	124947,56	26,2	134781,56	26,67	146182,31	27,39
7	Pengangkutan & komunikasi	25407,18	5,95	26456,56	5,88	29116,4	6,11	32260,42	6,38	36837,57	6,9
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	11648,6	2,73	12012,31	2,67	12454,65	2,61	13602,45	2,69	14223,17	2,67
9	Jasa-jasa	18724,05	4,38	19257,65	4,28	19909,48	4,17	20502,48	4,06	21332,55	4
	PDRB	**427.020,25**	**100**	**450.176,93**	**100**	**476.879,14**	**100**	**505.423,66**	**100**	**533.616**	**100**

*) Angka Sementara, **) Angka sangat sementara
Sumber : PDRB, BPS Halmahera Selatan

Sementara kumulatif konstribusi sektor PDRB atas harga berlaku selama lima tahun memberikan keterkaitan linear dengan konstribusi sektor PDRB atas harga konstan. Sektor perdangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan serta sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan perkembangan yang positif setelah sektor pertanian. Adapun konstribusi sektor PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi per Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Tahun 2005 – 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sektor	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008*		Tahun 2009**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	210423,42	41,94	226224,02	41,93	240205,68	40,5	299040,6	42,01	320811,95	39,89
2	Pertambangan & penggalian	1093,65	0,22	1371,44	0,25	5848,18	0,99	7885,17	1,11	10775,66	1,34
3	Industri pengolahan	96175,29	19,17	100391,22	18,61	116954,9	19,72	138753,41	19,49	168402,87	20,94
4	Listrik,gas & air bersih	2152,15	0,43	2204,02	0,41	2427,18	0,41	2727,81	0,38	3351,14	0,42
5	Konstruksi	4752,38	0,95	5293,74	0,98	5788,03	0,98	6684	0,94	7985,86	0,99
6	Perdagangan, hotel & restoran	110807,63	22,08	122766	22,76	135562,13	22,86	158359,14	22,25	180185,03	22,4
7	Pengangkutan & komunikasi	43329,08	8,64	46505,71	8,62	48424,35	8,17	55120,64	7,74	63013,63	7,84
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	13397,25	2,67	14455,2	2,68	15877,66	2,68	19969,78	2,81	23706,45	2,95
9	Jasa-jasa	19602,98	3,91	20272,92	3,76	21957,46	3,7	23329,6	3,28	26024,93	3,24
	PDRB	**501733,83**	**100**	**539484,26**	**100**	**593045,57**	**100**	**711870,15**	**100**	**804257,52**	**100**

**) Angka Sementara, **) Angka sangat sementara*
Sumber : PDRB, BPS Halmahera Selatan

Kondisi perbandingan antara persentase konstribusi sektor PDRB atas dasar harga belaku dengan PDRB atas dasar harga konstan selama lima tahun di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari 9 sektor yang dijadikan dasar dalam penilaian PDRB. Untuk mengetahui persentase per sektor dapat disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Perkembangan persentase Kontribusi per Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2005 - 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sektor	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008*		Tahun 2009**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	41,94	39,05	41,93	38,7	40,5	37,62	42,01	38,07	39,89	36,73
2	Pertambangan& penggalian	0,22	0,12	0,25	0,12	0,99	1,05	1,11	1,23	1,34	1,37
3	Industri pengolahan	19,17	22,04	18,61	21,79	19,72	21,22	19,49	19,94	20,94	19,99
4	Listrik,gas & air bersih	0,43	0,32	0,41	0,31	0,41	0,27	0,38	0,25	0,42	0,25
5	Konstruksi	0,95	0,75	0,98	0,74	0,98	0,75	0,94	0,71	0,99	0,69
6	Perdagangan, hotel, & restoran	22,08	24,65	22,76	25,52	22,86	26,2	22,25	26,67	22,4	27,39
7	Pengangkutan & komunikasi	8,64	5,95	8,62	5,88	8,17	6,11	7,74	6,38	7,84	6,9
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	2,67	2,73	2,68	2,67	2,68	2,61	2,81	2,69	2,95	2,67
9	Jasa-jasa	3,91	4,38	3,76	4,28	3,7	4,17	3,28	4,06	3,24	4
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

**) Angka Sementara, **) Angka sangat sementara*
Sumber : PDRB, BPS Halmahera Selatan

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan harga berlaku dengan pertumbuhan harga konstan memiliki persentase yang berbeda. Pertumbuhan atas harga konstan memperlihatkan konstribusi 12,89 persen per tahun, sebaliknya Pertumbuhan atas harga konstan sebesar 5,58 persen per tahun. Meningkatnya pertumbuhaan atas harga berlaku lebih dominan disebabkan oleh

pengaruh harga dibandingkan produktivitas, pertumbuhan kedua harga ini dapat disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Pertumbuhan Kontribusi per Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian	7,28	1,87
2	Pertambangan & penggalian	36,66	18,09
3	Industri pengolahan	21,37	5,83
4	Listrik,gas & air bersih	22,85	4,54
5	Konstruksi	19,48	2,73
6	Perdagangan, hotel & restoran	13,78	8,46
7	Pengangkutan & komunikasi	14,32	14,19
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	18,71	4,56
9	Jasa-jasa	11,55	4,05
	PDRB	**12,98**	**5,58**

Sumber : PDRB, BPS Halmahera Selatan

Kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dan berada di peringkat kedua di Provinsi Maluku Utara. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara terutama di sektor pertambangan dengan nilai kontribusi sebesar 36,7% berdasarkan harga berlaku dan 18.1% berdasarkan harga konstan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Perbandingan Indikator-indikator terpilih Kabupaten/Kota di Maluku Utara Tahun 2009

Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB (MiliarRupiah)	Peringkat
1	2	3	4
Ternate	7,77	845,5	1
Halmahera Selatan	5,58	804,3	2
Halmahera Utara	7,19	655,5	3
Kepulauan Sula	5,31	522,3	4
Halmahera Timur	7,16	411,7	5
Tidore Kepulauan	5,92	390,7	6
Halmahera Tengah	5,47	375,9	7
Halmahera Barat	4,63	323,8	8
Pulau Morotai	6,16	176,3	9

Sumber : PDRB, BPS Halmahera Selatan 2010

Indeks komposit Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 berada pada peringkat 3 dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Hal ini menunjukan adanya kontribusi kepada daerah dari sektor pertambangan sebesar 36,7 persen berdasarkan

harga berlaku dan 18,1 persen berdasarkan harga konstan. Rincian indeks komposit Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Indeks Komposit Tahun 2009

Kabupaten /Kota	Indeks Komposit	Peringkat
-1	-2	-3
Ternate	1,692	1
Halmahera Utara	0,466	2
Halmahera Selatan	0,179	3
Halmahera Timur	0,117	4
Tidore Kepulauan	-0,129	5
Kepulauan Sula	-0,300	6
Halmahera Tengah	-0,343	7
Pulau Morotai	-0,820	8
Halmahera Barat	-0,861	9

Sumber : PDRB, BPS Halmahera Selatan 2010

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Ditinjau dari aspek variasi sektoral yang membentuk struktur ekonomi, menunjukkan bahwa di Kabupaten Halmahera Selatan, peranan sektor pertanian masih sangat dominan, namun konstribusinya berfluktuasi yakni pada tahun 2005 sampai 2007 mengalami penurunan masing-masing sebesar 42,01%, 42,00%, dan 40,50%, sedangkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi sebesar 42,01%. Kembali menurun pada tahun 2009 menjadi 39,89%.

Sektor lainnya yang cukup dominan setelah sektor pertanian, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dengan tingkat konstribusi terhadap pembentukan nilai PDRB pada tahun 2005 masing-masing sebesar 22,78% dan 18,77%. Pada tahun 2006 masing-masing sebesar 22,76% dan 19,06%. Pada tahun 2007 masing-masing sebesar 22,86% dan 19,72%, pada tahun 2008 masing-masing sebesar 22,25% dan 19,49%, sedangkan pada tahun 2009 masing-masing sebesar 22,40% dan 20,94%.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan sebuah gejala ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga secara umum atau dengan menurunnya nilai mata uang secara riil. Kondisi ini (inflasi) biasanya selalu menyertai keterpurukan suatu perekonomian sehingga sering digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sejauh mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Walaupun pada tingkat dan kecepatan tertentu, inflasi yang terkontrol dapat menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi melalui efek *derived*, namun dalam

pengalamannya, terutama pada daerah-daerah yang belum maju inflasi selalu saja menjadi momok bagi perekonominan. Akibat buruk inflasi dapat ditunjukkan dengan tidak meratanya distribusi pendapatan akibat *income* riil dan tabungan riil menurun, terhambatnya produksi dan investasi akibat kenaikan harga yang tidak terkendali, biaya hidup meningkat, nilai uang semakin menurun, pengangguran, kemiskinan, serta gejala-gejala keterpurukan lainnya yang mengarah pada ketidakseimbangan ekonomi.

Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Halmahera Selatan mengacu pada laju inflasi Kota Ternate. Pada tahun 2007 tingkat inflasi Kota Ternate sebesar 10,43% meningkat menjadi 11,25% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 3,88%. Angka-angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi secara Nasional (harga implisit), dimana pada tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 inflasi atas harga implisit secara nasional masing-masing sebesar 6,59%, 11,06% dan 2,78%.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:

1) Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2) Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3) Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Halmahera Selatan dapat disajikan pada Tabel 2.14

Tabel 2.14 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2005-2009 KabupatenHalmahera Selatan

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	96,969	103,496	108,237	110,799
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	101.220	108.033	112.982	115.632
3	Angka melek huruf	95,80%	95,80%	95,80%	95,82%

Sumber :Halmahera Selatan dalam Angka tahun 2010.(BPS)

2. Angka rata-rata lama sekolah

Lama Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Jumlah tahun bersekolah tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi (kelebihan estimasi) atau bahkan terlalu rendah (underestimate). Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2005-2008 adalah 7,4 tahun sedangkan pada tahun 2009 menjadi 7,44 tahun.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu wilayah. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Selengkapnya perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009
1	**SD/MI**				
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	24.570	26.859	32.672	41.410
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	27.819	29.015	29.670	30.374
1.3.	APK SD/MI (%)	88,32	92,57	110,12	**136,33**
2	**SMP/MTs**				
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	71.310	8.764	10.416	11.653
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	12.090	12.607	12.922	13.228
2.3.	APK SMP/MTs (%)	58,98	69,52	80,61	**88,09**
3	**SMA/MA/SMK**				
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	4.933	5.756	6.807	7.721
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	10.741	11.149	11.472	11.741
3.3.	APK SMA/MA/SMK (%)	45,93	51,63	59,34	65,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dijadikan indikator dalam penilaian pendidikan terdapat juga Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut perkembangan APM di Kabupaten Halmhaera Selatan selama tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.16

Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009
1	**SD/MI**				
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	23.980	25.690	27.296	29.380
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	27.819	29.015	29.670	30.374
1.3.	APM SD/MI (%)	86,20	88,54	92,00	96,73
2	**SMP/MTs**				
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	6.871	8.325	9.899	11.126
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	12.090	12.607	12.922	13.228
2.3.	APM SMP/MTs (%)	56,83	66,03	76,61	84,11
3	**SMA/MA/SMK**				
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	4.707	5.468	6.201	6.850
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	10.741	11.149	11.472	11.741
3.3.	APM SMA/MA/SMK (%)	43,82	49,04	54,05	58,34

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan

4. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat

kualifikasi pendidikan angkatan kerja disuatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seperti tercantum dalam Tabel 2.17

Tabel 2.17 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	APT	2009 (%)
1.	SD	38,49
2.	SMP	17,83
3.	SMA	11,51
4.	Perguruan Tinggi	2,18

Sumber : BPS Kab. Halmahera Selatan

5. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2009 menunjukkan peningkatan, meskipun belum mencapai target sesuai rencana. IPM naik dari **65,6** pada tahun 2005 menjadi **66,02** pada tahun 2006, **66,93** pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi **67,59** serta pada tahun 2009 IPM Kabupaten Halmahera Selatan mencapai **67,62** dapat dilihat pada Tabel 2.18

Tabel 2.18 Perbandingan Indikator IPM (HDI) Kabupaten/Kota di Maluku Utara Tahun 2009

Kabupaten /Kota	IPM	Peringkat
Ternate	76,13	1
Tidore Kepulauan	69,28	2
Halmahera Tengah	68,67	3
Halmahera Utara	67,67	4
Halmahera Selatan	67,62	5
Kepulauan Sula	67,5	6
Halmahera Timur	67,5	7
Halmahera Barat	66,63	8
Pulau Morotai	64,15	9

Sumber : BPS Kab. Halmahera Selatan

Upaya peningkatan IPM di Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan secara simultan baik melalui pendekatan sektoral secara terintegrasi. Nilai IPM yang dicapai Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 sebesar 67.62 dan berada di peringkat 5 dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Nilai IPM ini dicapai melalui program pemerintah periode 2005-2010 yaitu

1) Pendidikan gratis sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu hasil yang dicapai melalui program pendidikan gratis adalah keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
2) Kesehatan gratis sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa hasil yang dicapai melalui penurunan angka kematian bayi, pemberantasan penyakit menular, peningkatan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.
3) Pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya peningkatan pendapatan per kapita penduduk.

2.2.2.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu dalam rangka membangun sumber daya manusia, maka derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan berbagai program pembangunan kesehatan gratis yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pencapaian program tersebut berupa penyediaan sarana kesehatan yang meliputi :

1. jumlah sarana utama kesehatan sampai akhir 2010 sebanyak 157 unit terdiri dari 2 unit rumah sakit, 30 unit puskesmas, 14 unit puskesmas pembantu, 110 Polindes/Poskesdes dan satu unit Gedung *Malaria Center*.
2. jumlah dokter 34 orang, terdiri dari dokter spesialis/ahli 4 orang, dokter umum 8 orang dan 1 orang dokter gigi.
3. Tenaga medis lainnya sebanyak 277 orang, terdiri dari bidan 69 orang, Perawat 208 orang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan telah mengintensifkan pelayanan kesehatan secara terpadu bagi masyarakat termasuk balita dan ibu hamil. Pada tahun 2009 jumlah penderita sakit yang telah dilayani tercatat sebanyak 96.362 orang pada berbagai jenis penyakit antara lain Infeksi Saluran Pernapasan Atas (Ispa) 46,20%, Malaria dan Jamur masing-masing 9,62%, Neurotik 8,66%, Alergi 7,59%, Hypertensi 6,80%, Diare 3,64%, Kulit 2,89 %, Persendian 2,82% dan Gigi 2,16%. Adapun sepuluh jenis penyakit yang sering dialami masyarakat Halmahera Selatan sebagaimana dilihat pada Gambar 2.4

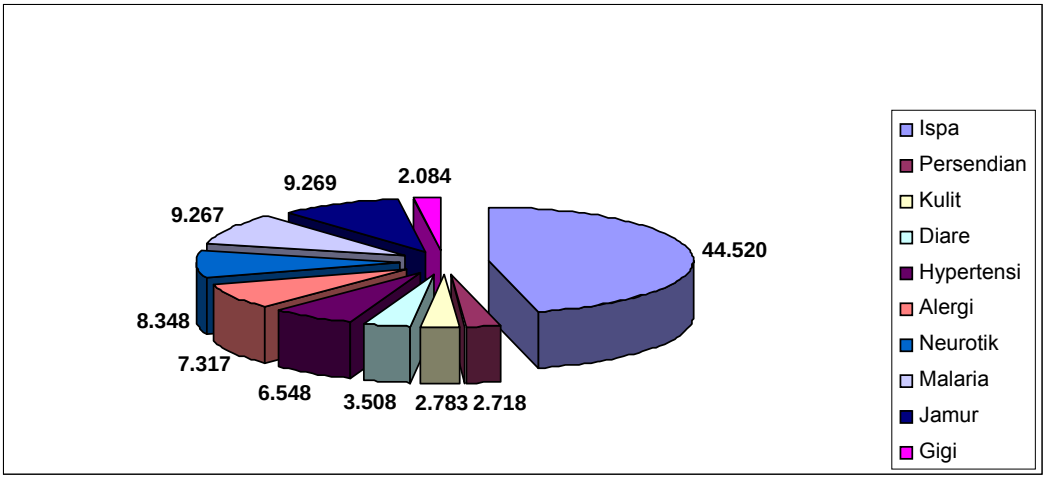

Gambar 2.4. Sepuluh Penyakit terbesar di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

Pencapaian program bidang kesehatan dari aspek kesejahteraan di Kabupaten Halmahera Selatan periode 2005-2010 dapat dijelaskan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat kontrasepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta

program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Untuk meningkatkan kelangsungan bayi di 30 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilakukan melalui vaksinasi dengan berbagai tipe vaksin yang diberikan seperti jenis BCG, DPT I, Polio, Campak, TT I dan TT2. Adapun jumlah Balita dan ibu hamil yang mendapat vaksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.19

Tabel 2.19 Jumlah Balita dan Ibu Hamil yang Mendapat Vaksinasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Jenis Vaksinasi (orang)						Total
		BCG	DPT I	Polio	Campak	TT I	TT II	
1	Bacan	236	335	334	336	234	184	1659
2	Bacan Barat	76	96	94	85	67	47	465
3	Bacan Barat Utara	101	124	110	112	46	35	528
4	Bacan Selatan	414	296	265	253	52	53	1333
5	Bacan Timur	105	128	117	112	154	128	744
6	Bacan Timur Selatan	167	183	134	127	10	17	638
7	Bacan Timur Tengah	93	157	125	154	172	126	827
8	Gane Barat	180	168	254	198	137	116	1053
9	Gane Barat Selatan	77	130	118	117	86	80	608
10	Gane Barat Utara	90	134	220	88	212	146	890
11	Gane Timur	134	190	140	156	63	43	726
12	Gane Timur Selatan	76	76	25	29	54	38	298
13	Gane Timur Tengah	68	78	68	76	105	73	468
14	Kasiruta Barat	109	93	121	116	175	124	738
15	Kasiruta Timur	101	111	94	89	147	88	630
16	Kayoa	171	182	154	145	106	58	816
17	Kayoa Barat	78	77	72	72	156	103	558
18	Kayoa Selatan	67	72	84	75	73	35	406
19	Kayoa Utara	45	45	29	29	119	65	332
20	Kep Batanglomang	107	133	106	121	40	41	548
21	Kep Joronga	118	130	138	111	102	66	665
22	Makian	81	62	69	72	112	131	527
23	Makian Barat	24	38	49	61	142	122	436
24	Mandioli Selatan	108	130	95	100	21	41	495
25	Mandioli Utara	68	94	44	46	48	34	334
26	Obi	245	298	201	198	30	32	1004
27	Obi Barat	68	138	64	89	57	38	454
28	Obi Selatan	128	196	150	154	68	54	750
29	Obi Timur	60	73	60	61	87	101	442
30	Obi Utara	190	192	213	213	130	84	1022
Total		**3.585**	**4.159**	**3.747**	**3.595**	**3.005**	**2.303**	**20.394**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halsel

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka usia harapan hidup Kabupaten Halmahera Selatan adalah berkisar pada usia 65 Tahun.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

3. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO dan pada tahun 1999 WHO mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

1) rendah = di bawah 10 %
2) sedang = 10-19 %
3) tinggi = 20-29 %
4) sangat tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Presentase gizi buruk yang

terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar 0,05%, termasuk dalam kategori rendah.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pendidikan

Pencapaian program bidang pendidikan dari aspek pelayanan di Kabupaten Halmahera Selatan periode 2005-2010 dapat dijelaskan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS dapat dilihat pada Tabel 2.20

Tabel 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2006-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009
1	**SD/MI**				
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	23.980	25.690	27.296	29.380
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	27.819	29.015	29.670	30.374
1.3.	APS SD/MI	862	885	920	967
2	**SMP/MTs**				
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	6.871	8.325	9.899	11.126
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	12.090	12.607	12.922	13.228
2.3.	APS SMP/MTs	568	660	766	841
3	**SMU/MA/SMK**				
3.1.	jumlah murid usia 16-18 thn	4.707	5.468	6.201	6.850
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	10.741	11.149	11.472	11.741
3.3.	APS SMU/SMK	438	490	540	583

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Halsel

2. Rasio ketersediaan sekolah/Murid/Guru

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rincian sarana pendidikan, jumlah siswa, tenaga pengajar serta rasio siswa/guru dan rasio siswa/sekolah untuk tiap kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Data Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru serta Rasio Siswa/Guru dan Rasio Siswa/Sekolah, tahun 2005 dan 2009

NO.	URAIAN	TAHUN		PERTUMBUHAN
		2005	2009	(%)
1	**Lembaga Pendidikan**			
	TK	10	35	250%
	SD	273	291	7%
	SMP	67	97	45%
	SMA/SMK	27	54	100%
2	**Siswa**			
	TK	287	828	189%
	SD	20.747	41.410	94%
	SMP	7.449	11.653	56%
	SMA/SMK	3.953	7.721	95%
3	**Guru**			
	TK	12	26	117%
	SD	1.103	1.877	70%
	SMP	510	467	(8%)
	SMA/SMK	170	481	183%
4	**Rasio Murid/Guru**			
	TK	23,92	31,85	33%
	SD	18,81	21,40	14%
	SMP	14,61	24,95	71%
	SMA/SMK	23,25	16,05	(31%)
5	**Rasio Murid/Sekolah**			
	TK	28,70	23,66	(18%)
	SD	76,00	138,02	82%
	SMP	111,18	120,13	8%
	SMA/SMK	146,41	142,98	(2%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

2.3.2 Kesehatan

Pencapaian program bidang kesehatan dari aspek pelayanan di Kabupaten Halmahera Selatan periode 2005-2010 dapat dijelaskan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas

kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2) Membudayakan NKKBS.
3) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Rasio ketersediaan Posyandu dengan Jumlah Balita dapat dilihat pada Tabel 2.22

Tabel 2.22 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2006-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	**Jumlah posyandu**	272	293	306	305
2.	**Jumlah balita**	15.632	16.873	17.213	19.839
3.	**Rasio**	17,40	17,36	17,77	15,37

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halmahera Selatan

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu

Kondisi sarana prasarana kesehatan selama periode 2005-2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 dengan penduduk sebanyak 178.087 dilayani oleh 17 puskesmas, 41 poliklinik, dan 8 pustu sementara pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 194.712 terjadi peningkatan jumlah puskesmas menjadi 30, poliklinik menjadi 95, dan pustu meningkat jumlahnya menjadi 20. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan telah memenuhi salah satu standar pelayanan minimum (SPM) kesehatan. Jumlah sarana prasarana kesehatan di Halmahera Selatan dijelaskan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2005-2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Puskesmas	17	20	27	30
2.	Jumlah Poliklinik	41	75	75	95
3.	Jumlah Pustu	8	33	26	20
4.	Jumlah Penduduk	178.087	184.951	190.234	194.712
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,10	0,11	0,14	0,15
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,23	0,41	0,39	0,49
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,04	0,18	0,14	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan (data diolah)

Perkembangan jumlah sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Poliklinik di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan rasio dengan jumlah penduduk dan secara rinci per kecamatan dijelaskan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
1	Obi Selatan	13.983	1	0,07	2	0,14	1	0,07
2	Obi	11.815	1	0,08	3	0,25		
3	Obi Barat	4.379	1	0,23	2	0,46	2	0,46
4	Obi Timur	2.396	1	0,42	2	0,83		
5	Obi Utara	7.293	1	0,14	1	0,14		
6	Bacan	14.825	1	0,07	1	0,07		
7	Mandioli Selatan	3.871	1	0,26	2	0,52		
8	Mandioli Utara	3.040	1	0,33	4	1,32	1	0,33
9	Bacan Selatan	9.214	1	0,11	1	0,11		
10	Kep Batanglomang	6.754	1	0,15	3	0,44		
11	Bacan Timur	5.855	1	0,17	4	0,68	1	0,17
12	Bacan Timur Selatan	6.406	1	0,16	3	0,47	1	0,16
13	Bacan Timur Tengah	5.828	1	0,20	6	1,03		
14	Bacan Barat	6.286	1	0,39	5	0,80		
15	Kasiruta Barat	5.126	1	0,22	5	0,98		
16	Kasiruta Timur	2.568	1	0,10	2	0,78	2	0,78
17	Bacan Barat Utara	4.581	1	0,26	3	0,65	1	0,22
18	Kayoa	9.806	1	0,16	6	0,61	1	0,10
19	Kayoa Barat	3.815	1	0,33	3	0,79		
20	Kayoa Selatan	6.234	1	0,16	3	0,48		
21	Kayoa Utara	3.075	1	0,33	2	0,65	1	0,33
22	Makian	11.083	1	0,09	4	0,36	1	0,09
23	Makian Barat	3.957	1	0,25	4	1,01		
24	Gane Barat	7.672	1	0,13	4	0,52	2	0,26
25	Gane Barat Selatan	5.559	1	0,18	2	0,36	1	0,18
26	Gane Barat Utara	6.595	1	0,15	5	0,76	2	0,30
27	Kep Joronga	4.453	1	0,22	3	0,67	1	0,22
28	Gane Timur	9.631	1	0,10	4	0,42	1	0,10
29	Gane Timur Tengah	4.604	1	0,22	2	0,43	1	0,22
30	Gane Timur Selatan	4.008	1	0,25	4	1,00		
JUMLAH/Rata-rata		**194.712**	**30**	**0,15**	**95**	**0,49**	**20**	**0,10**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan

3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang dikelola tenaga medis profesional, terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per jumlah penduduk tahun 2006-2009 disajikan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25. Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	-	-	-	-
3.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	2
4.	Jumlah Penduduk	178.087	184.951	190.234	194.712
5.	Rasio	0,006	0,005	0,005	0,010

Sumber : RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan

4. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Halmahera Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Halmahera Selatan. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.26

Tabel 2.26 Rasio Dokter per jumlah penduduk Tahun 2006-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Dokter	6	28	44	34
2	Jumlah Penduduk	178.087	184.951	190.234	194.712
3	Rasio	0,034	0,151	0,231	0,175

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan

5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Mencermati dengan ketersediaan tenaga medis seyoglah perlu tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, yang dapat dijelaskan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2005- 2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Tenaga Medis	176	553	318	290
2	Jumlah Penduduk	178.087	184.951	190.234	194.712
3	Rasio	0,99	2,99	1,67	1,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan

Pemenuhan tenaga dokter untuk setiap kecamatan harus dilakukan guna meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan tenaga dokter di Kabupaten Halmahera Selatan selama tahun 2009 dapat dijelaskan secara rinci pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	2	3	4	(5=4/3)
1	Obi Selatan	13.983	0	0,00
2	Obi	11.815	3	0,25
3	Obi Barat	4.379	1	0,23
4	Obi Timur	2.396	1	0,42
5	Obi Utara	7.293	1	0,14
6	Bacan	14.825	3	0,20
7	Mandioli Selatan	3.871	1	0,26
8	Mandioli Utara	3.040	1	0,33
9	Bacan Selatan	9.214	1	0,11
10	Kep Batanglomang	6.754	1	0,15
11	Bacan Timur	5.855	1	0,17
12	Bacan Timur Selatan	6.406	1	0,16
13	Bacan Timur Tengah	5.828	1	0,17
14	Bacan Barat	6.286	1	0,16
15	Kasiruta Barat	5.126	1	0,20
16	Kasiruta Timur	2.568	1	0,39
17	Bacan Barat Utara	4.581	1	0,22
18	Kayoa	9.806	3	0,31
19	Kayoa Barat	3.815	1	0,26
20	Kayoa Selatan	6.234	1	0,16
21	Kayoa Utara	3.075	1	0,33
22	Makian	11.083	2	0,18
23	Makian Barat	3.957	1	0,25
24	Gane Barat	7.672	2	0,26
25	Gane Barat Selatan	5.559	1	0,18
26	Gane Barat Utara	6.595	1	0,15
27	Kep Joronga	4.453	1	0,22
28	Gane Timur	9.631	2	0,21
29	Gane Timur Tengah	4.604	1	0,22
30	Gane Timur Selatan	4.008	1	0,25
JUMLAH		**194.712**	**34**	**0,17**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan

2.3.3 Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Selatan dilihat dari persentase jumlah sampah yang ditangani dengan jumlah volume produksi sampah mengalami peningkatan dari 51,6% pada tahun 2009 menjadi 54,5% pada tahun 2010 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Jumlah Volume Sampah dan Produksi SampahTahun 2009-2010

NO	Uraian	2009	2010
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	7.135	9.546
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3)	13.824	17.520
3.	Persentase	51,6 %	54,48 %

Sumber : BPLHK Kab. Halmahera Selatan

2.3.4 Sarana dan Prasarana Umum

2.3.4.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu :

1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1) Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.
2) Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.

3) Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.
4) Klasifikasi kelas jalan di Kabupaten Halmahera Selatan meliputi : jalan kabupaten sepanjang 479 Km, jalan provinsi sepanjang 405,20 Km dan jalan nasional sepanajang 76,32 Km

2. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
2) Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas.
3) Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
4) Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
5) Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Adapun perkembangan kondisi jalan selama lima tahun di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2005-2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kondisi Baik	14.750	35.600	45.400	76.893	83.921
2.	Kondisi Sedang Rusak	13.300	18.240	35.590	31.590	36.648
3.	Kondisi Rusak	8.750	10.195	18.470	54.560	76.795
4.	Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-	-
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	36.800	64.035	99.460	163.043	197.364

Sumber : Dinas PU Kab. Halmahera Selatan

3. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan

Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya.

Kondisi diukur (terutama) dengan besaran nilai Kondisi, sedangkan aspek pemanfaatan diukur dengan besaran V/C ratio. V/C ratio menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani arus (pergerakan) lalu lintas, dimana semakin besar nilai V/C ratio berarti semakin rendahnya tingkat pelayanan jalan tersebut yang ditunjukkan dengan terjadinya kemacetan. Batasan nilai V/C ratio yang menunjukkan tingkat pelayanan mulai mendekati kemacetan diambil > 0,65.

2.3.4.2 Tempat ibadah

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki persentasi pemeluk muslim sebanyak 70% dan non muslim sebanyak 30% yang didukung sarana prasarana ibadah yang belum memadai. Rasio tempat ibadah dengan pemeluk agamanya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.31

Tabel 2.31 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2005-2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Bangunan tempat Ibadah	Thn 2005			Thn 2010		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/8)
1.	Mesjid	290	-	-	352	-	-
2.	Gereja	58	-	-	74	-	-
	Jumlah	**348**	-	-	**426**	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab. Halmahera Selatan

2.3.4.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan khususnya sarana sanitasi dasar di rumah tangga**,** antara lain ditunjukkan oleh tingkat kepemilikan sarana air bersih baru mencapai 47%, sarana pembuangan air limbah mencapai 37%, jamban baru mencapai 51%, dan tempat sampah mencapai 48%.

2.3.5 Penataan Ruang

2.3.5.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
2. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2011 seluas 201,80 hektar dan direncanakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Halmahera Selatan seluas 19.321,33 hektar pada tahun 2030.

2.3.5.2 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Ijin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Jumlah bangunan yang ber-IMB dapat disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2010 Kabupaten Halmahera Selatan

No	Uraian	2010
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	338
2.	Jumlah Bangunan	37.670
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,89 %

Sumber : Dinas PU Kab. Halmahera Selatan

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2.3.6 Perhubungan

2.3.6.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum Kabupaten Halmahera Selatan periode 2006-2010 mengalami peningkatan. Data penumpang 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pelabuhan Laut	Orang	53.022	60.152	76.695	94.187	110.900
2	Bandar Udara	Orang	419	1.754	605	891	3.190
3	Terminal	Orang	-	-	-	-	-
	Jumlah		53.441	61.906	77.300	95.078	114.090

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Halsel

2.3.6.2 Ijin Trayek

Ijin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas:

1. jaringan trayek lintas batas negara;
2. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
3. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
4. jaringan trayek perkotaan; dan
5. jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang, perkembangan izin trayek angkutan selama kurun waktu empat tahun sebagaiman dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Rasio Ijin Trayek Tahun 2006-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

No	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Izin Trayek perkotaan	53	55	95	136
2.	Izin Trayek perdesaan	-	-	-	-
3.	Jumlah Izin Trayek	53	55	95	136
4.	Jumlah penduduk	178.087	184.951	190.234	194.712
5.	Rasio Izin Trayek	0,0003	0,0003	0,0005	0,0007

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Halsel

2.3.6.3 Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

1. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
2. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Dinas perhubungan Halmahera Selatan telah melakukan uji kir sebanyak 394 kendaraan pada tahun 2010, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebanyak 166 kendaraan.

2.3.6.4 Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Sedangkan terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Adapun jumlah dermaga dan terminal angkutan darat selama 5 Tahun sebagaimana tercantum pada tabel 2.35.

Tabel 2.35 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2006-2010 Kabupaten Halmahera Selatan

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah pelabuhan laut	18	30	65	72	82
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	1	1	2	2	2
	Jumlah	20	32	68	75	85

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan

2.3.7 Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

2.3.8 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

2.3.8.1 Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Perkembangan koperasi di Halmahera Selatan menunjukkan trend positif dengan presentase diatas 50% yang ditunjukkan pada Tabel 2.36

Tabel 2.36 Persentase Koperasi Aktif sampai Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2009
1	Jumlah koperasi aktif	123
2	Jumlah koperasi	221
3	Persentase koperasi aktif	55%

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halmahera Selatan

2.3.8.2 Usaha Kecil Menengah Non BPR/LKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki jumlah Usaha Kecil Menengah sebanyak 817 dan non Lembaga keuangan mikro sebesar 832, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.37

Tabel 2.37 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2009
1	Jumlah seluruh UKM	817
2	Jumlah BPR/LKM	15
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	832

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Halmahera Selatan

2.3.8.3 Badan Perkreditan Rakyat / Lembaga Keuangan Mikro

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan *(deposits)*, kredit *(loan)*, pembayaran sebagai transaksi jasa *(payment service)* serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai

lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM di Kabupaten Halmahera Selatan tercantum dalam Tabel 2.38.

Tabel 2.38 Jumlah BPR/LKM Tahun 2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2010
1	Jumlah BPR	--
2	Jumlah LKM	15
3	Jumlah BPR dan LKM	15

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Halmahera Selatan

2.3.9 Kependudukan

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.39

Tabel 2.39 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

No	Fertilitas/mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR)	
2	Angka kematian kasar (CDR)	
3	Angka kematian bayi (IMR)	

Sumber : Badan UP, KB dan Keluarga Sejahtera Kab. Halmahera Selatan

Distribusi kelompok umur dapat menjelaskan ukuran terhadap umur produktif dan non produktif. Adapun kelompok umur di Kabupaten Halmahera selatan dalam kurun waktu 4 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.40

Tabel 2.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2006-2009

Kelompok Umur	2006	2007	2008	2009
0-4	26.307	27.383	28.072	28.732
5-9	24.477	25.480	26.061	26.672
10-14	21.641	22.596	23.120	23.664
15-19	18.053	18.751	19.284	19.736
20-24	16.500	17.143	17.636	18.055
25-29	14.597	15.094	15.580	15.945
30-34	12.835	13.233	13.712	14.035
35-39	10.433	10.845	11.263	11.532
40-44	9.221	9.494	9.856	10.086
45-49	6.730	6.969	7.198	7.370
50-54	5.864	6.076	6.254	6.401
55-59	3.495	3.621	3.737	3.828
60-64	3.458	3.593	3.687	3.776
65 +	4.476	4.673	4.774	4.881
Jumlah	178.087	184.951	190.234	194.712

Sumber : Halmahera Selatan dalam angka (BPS)

2.3.10 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja *(man power)* adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Gambar 2.5 menjelaskan hubungan dan klasifikasi penduduk dengan tenaga kerja.

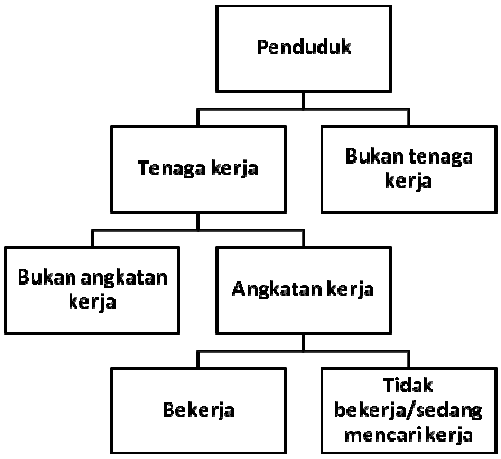

Gambar 2.5 Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan

2.3.10.1 Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO *(International Labour Organization)*, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2010 Kabupaten Halmahera Selatan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja			73.599
	Pengangguran			3.874
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)			77.473
2				
	Sekolah			17.381
	Mengurus RT			19.622
	Lainnya			1.128
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)			38.171
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)			115.644
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)			67%
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)			5%

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halmahera Selatan

Angkatan kerja selama tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan dapat digolongkan menurut umur menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja lebih dominan dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja. Ini mengindikasikan akan menurunkan angka pengangguran serta tingkat kriminal sosial lainnya, lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42 Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
15-19	12.562	661	13.223
20-24	11.492	605	12.097
25-29	10.149	534	10.683
30-34	8.933	470	9.403
35-39	7.340	386	7.726
40-44	6.420	338	6.758
45-49	4.691	247	4.938
50-54	4.074	214	4.289
55-59	2.437	128	2.565
60-64	2.394	126	2.521
65+	3.107	164	3.270
Total	73.599	3.874	77.473

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halmahera Selatan

2.3.11 Komunikasi dan Informasi

2.3.11.1 Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Perkembangan jaringan komunikasi dapat disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43 Jaringan Komunikasi Tahun 2005-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	Tahun 2005	Tahun 2009
1	Jumlah jaringan telepon genggam	--	2
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	1	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan

2.3.11.2 Warung Telepon / Warung Internet

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk.

Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan

telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Secara rinci warnet menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44 Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2005-2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Kecamatan	Tahun 2005					Tahun 2009				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio warnet	Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/3)	(7=5/3)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
1	Obi Selatan		0	0	0	0	13.983	0	0	0	0
2	Obi		0	0	0	0	11.815	0	0	0	0
3	Obi Barat		0	0	0	0	4.379	0	0	0	0
4	Obi Timur		0	0	0	0	2.396	0	0	0	0
5	Obi Utara		0	0	0	0	7.293	0	0	0	0
6	Bacan		5	0	5	0	14.825	2	2	0,01	0,01
7	Mandioli Selatan		0	0	0	0	3.871	0	0	0	0
8	Mandioli Utara		0	0	0	0	3.040	0	0	0	0
9	Bacan Selatan		1	0	1	0	9.214	0	0	0	0
10	Kep Batanglomang		0	0	0	0	6.754	0	0	0	0
11	Bacan Timur		0	0	0	0	5.855	0	0	0	0
12	Bacan Timur Selatan		0	0	0	0	6.406	0	0	0	0
13	Bacan Timur Tengah		0	0	0	0	5.828	0	0	0	0
14	Bacan Barat		0	0	0	0	6.286	0	0	0	0
15	Kasiruta Barat		0	0	0	0	5.126	0	0	0	0
16	Kasiruta Timur		0	0	0	0	2.568	0	0	0	0
17	Bacan Barat Utara		0	0	0	0	4.581	0	0	0	0
18	Kayoa		0	0	0	0	9.806	0	0	0	0
19	Kayoa Barat		0	0	0	0	3.815	0	0	0	0
20	Kayoa Selatan		0	0	0	0	6.234	0	0	0	0
21	Kayoa Utara		0	0	0	0	3.075	0	0	0	0
22	Makian		0	0	0	0	11.083	0	0	0	0
23	Makian Barat		0	0	0	0	3.957	0	0	0	0
24	Gane Barat		0	0	0	0	7.672	0	0	0	0
25	Gane Barat Selatan		0	0	0	0	5.559	0	0	0	0
26	Gane Barat Utara		0	0	0	0	6.595	0	0	0	0
27	Kep Joronga		0	0	0	0	4.453	0	0	0	0
28	Gane Timur		0	0	0	0	9.631	0	0	0	0
29	Gane Timur Tengah		0	0	0	0	4.604	0	0	0	0
30	Gane Timur Selatan		0	0	0	0	4.008	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan

2.3.12 Perpustakaan

2.3.12.1 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan

pendidikan. Jumlah perpustakaan di Halmahera Selatan sebanyak 37 unit seperti terlihat pada Tabel 2.45

Tabel 2.45 Jumlah Perpustakaan Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

Uraian	2009*
Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	37
Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-
Total Perpustakaan (1+2)	37

Sumber : Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halmahera Selatan

2.3.12.2 Pengunjung Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2009 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2009
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	155
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	--
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	155

Sumber : Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halmahera Selatan

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Peningkatan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini :

1. **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**

   Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Tingkat konsumsi rumah tangga per kapita dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2009
1.	Total Pengeluaran RT	
2.	Jumlah RT	48.772
3.	Rasio (1./2.)	

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halsel

2. **Produktivitas Total Daerah**

   Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor, sebagaimana dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48 Produktivitas Per Sektor atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sektor	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008*		Tahun 2009**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	210423,42	41,94	226224,02	41,93	240205,68	40,5	299040,6	42,01	320811,95	39,89
2	Pertambangan & penggalian	1093,65	0,22	1371,44	0,25	5848,18	0,99	7885,17	1,11	10775,66	1,34
3	Industri pengolahan	96175,29	19,17	100391,22	18,61	116954,9	19,72	138753,41	19,49	168402,87	20,94
4	Listrik,gas & air bersih	2152,15	0,43	2204,02	0,41	2427,18	0,41	2727,81	0,38	3351,14	0,42
5	Konstruksi	4752,38	0,95	5293,74	0,98	5788,03	0,98	6684	0,94	7985,86	0,99
6	Perdagangan, hotel & restoran	110807,63	22,08	122766	22,76	135562,13	22,86	158359,14	22,25	180185,03	22,4
7	Pengangkutan & komunikasi	43329,08	8,64	46505,71	8,62	48424,35	8,17	55120,64	7,74	63013,63	7,84
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	13397,25	2,67	14455,2	2,68	15877,66	2,68	19969,78	2,81	23706,45	2,95
9	Jasa-jasa	19602,98	3,91	20272,92	3,76	21957,46	3,7	23329,6	3,28	26024,93	3,24
	PDRB	**501733,83**	**100**	**539484,26**	**100**	**593045,57**	**100**	**711870,15**	**100**	**804257,52**	**100**

**Angka Sementara, **Angka sangat sementara*
Sumber : PDRB, BPS Halsel

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu 5 tahun sektor primer menjadi andalan dibandingkan dengan sektor-sektor sekunder dan tersier. Sektor primer yang paling tinggi yaitu sektor pertanian diata 35% sedangkan sektor tersier hanya berkisar 4%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.49

Tabel 2.49 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005-2009
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sektor	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008*		Tahun 2009**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	41,94	39,05	41,93	38,7	40,5	37,62	42,01	38,07	39,89	36,73
2	Pertambangan& penggalian	0,22	0,12	0,25	0,12	0,99	1,05	1,11	1,23	1,34	1,37
3	Industri pengolahan	19,17	22,04	18,61	21,79	19,72	21,22	19,49	19,94	20,94	19,99
4	Listrik,gas & air bersih	0,43	0,32	0,41	0,31	0,41	0,27	0,38	0,25	0,42	0,25
5	Konstruksi	0,95	0,75	0,98	0,74	0,98	0,75	0,94	0,71	0,99	0,69
6	Perdagangan, hotel, & restoran	22,08	24,65	22,76	25,52	22,86	26,2	22,25	26,67	22,4	27,39
7	Pengangkutan & komunikasi	8,64	5,95	8,62	5,88	8,17	6,11	7,74	6,38	7,84	6,9
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	2,67	2,73	2,68	2,67	2,68	2,61	2,81	2,69	2,95	2,67
9	Jasa-jasa	3,91	4,38	3,76	4,28	3,7	4,17	3,28	4,06	3,24	4
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*. *Angka Sementara, **Angka sangat sementara*
Sumber : PDRB, BPS Halsel

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya *(availability)* dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Pencapaian penyediaan fasilitas wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat melalui Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2006-2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Panjang Jalan	36.800	64.035	99.460	163.043	197.364
2.	Jumlah Kendaraan	166	193	257	311	394
3.	Rasio	221,69	331,79	387,00	524,25	500,92

Sumber : Bappeda Kab. Halmahera Selatan (data diolah)

Penyediaan fasilitas infrastrukur akan memberikan dampak dalam mempercepat pergerakan roda perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang memanfaatkan fasilitas tersebut seperti fasilitas dermaga, bandara udara, terminal yang setiap tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51 Jumlah Orang melalui Dermaga, Bandara, Terminal Tahun 2006-2010 Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pelabuhan Laut	Orang	53.022	60.152	76.695	94.187	110.900
2	Bandar Udara	Orang	419	1.754	605	891	3.190
3	Terminal	Orang	-	-	-	-	-
	Jumlah		53.441	61.906	77.300	95.078	114.090

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan (data diolah)

2.4.3 Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

2.4.3.1 Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan sampai tahun 2010 telah ada 4 bank yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.51.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 2.52 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Sektor	Jumlah	
		2005	2010
1.	Bank Umum		
	1.1. Konvensional	2	3
	1.2. Syariah	-	1
2.	BPR		
	2.1. Konvensional	-	-
	2.1.Syariah	-	-
	Jumlah	***2***	***4***

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halsel

2.4.3.2 Perusahaan Asuransi

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jenis dan Jumlah perusahaan dan cabangnya di Kabupaten Halmahera Selatan selama tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.53

Tabel 2.53 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Sektor	Jumlah	
		2005	2010
1.	Perusahaan Asuransi Kerugian		
	1.1. Konvensional	1	2
	1.2. Syariah	-	-
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa		
	2.1. Konvensional	-	1
	2.2. Syariah	-	2
	Jumlah	***1***	***5***

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halsel

2.4.4 Ketersediaan air bersih

Air Bersih *(clean Water) adalah* air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum *(drinking water) adalah* air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas:

1. Air Hujan
2. Air Sungai dan Danau
3. Mata Air
4. Air Sumur Dangkal / Air Sumur Dalam

Salah satu pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat khusus rumah tangga adalah adanya pemenuhan sumber air bersih sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan Kemenkes Nomor 907 Tanun 2002. Besaran persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air selama selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 2.54

Tabel 2.54 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sumber Air Bersih	2008	2009	2010
1.	Leding (Perpipaan)	-	-	-
2.	Sumur Lindung	-	-	-
3.	Sumur Tidak Terlindung	-	-	-
4.	Mata Air Terlindung	-	-	-
5.	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-
6.	Sungai	-	-	-
7.	Danau/Waduk	-	-	-
8.	Air Hujan	-	-	-
9.	Air Kemasan	-	-	-
10.	Lainnya	-	-	-
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih			17.349
12.	Jumlah Rumah Tangga			38.588
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	34,48	42,62	44,96

2.4.5 Fasilitas listrik dan telepon

2.4.5.1 Rumah tangga yang menggunakan listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Pencapaian penyediaan fasilitas listrik di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.55.

Tabel 2.55 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

No	Uraian	2009
1.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	17.070
2.	Jumlah Rumah Tangga	48.772
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (1)/(2)	35%

Sumber : Dinas Pertambangan Kab. Halmahera Selatan

2.4.5.2 Penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Pencapaian penyediaan fasilitas telepon/hp di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.56.

Tabel 2.56 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Halmahera Selatan

No	Uraian	2008	2009
1.	Penduduk yang memiliki HP	44.191	41.727
2.	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	4.908	1.207
3.	Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)	49.099	42.934
4.	Jumlah penduduk	190.234	194.712
5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)	25,81	22,05

Sumber : BPS Halmahera Selatan

2.4.6 Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jumlah penginapan di Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2009 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Halmahera Selatan

Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2009*		
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	17	250	500
Total Jumlah penginapan/Hotel	17	250	500

Sumber : Data diolah dari BPS Kab. Halmahera Selatan

2.4.7 Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.58. Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IU I : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Tabel 2.58 Lama Proses Perijinan Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	14 hari	-	-
2.	TDP	14 hari	-	-
3.	IUI	14 hari	-	-
4.	TDI	14 hari	-	-
5.	IMB	14 hari	-	-
6.	HO	14 hari	-	-

2.4.8 Status desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan

pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

   Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

   Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

   Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa

swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Desa-desa di Kabupaten Halmahera Selatan masih tergolong desa swadaya/desa terbelakang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 249 desa pada tahun 2009.

2.4.11 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.4.11.1 Kualitas tenaga kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Tingginya kualitas sumberdaya manusia secara langsung akan mendorong indeks pembangunan manusia dan tersedianya tenaga kerja siap pakai sesuai dengan tingkat dan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Perkembangan penduduk pada golongan umur 10 tahun keatas dapat dipilahkan menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.59

Tabel 2.59 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

NO	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tidak punya ijazah	45,54	54,46	29,98
2.	SD dan sederajat	50,93	49,07	38,49
3.	SMP dan sederajat	58,77	41,23	17,83
4.	SMA dan sederajat	62,07	37,93	9,58
5.	SMK	64,86	35,14	1,93
6.	D1 / D2	69,97	30,03	1,03
7.	D3 / Sarjana Muda	83,47	16,53	0,36
8.	D4 / S1 / S2 / S3	48,95	61,05	0,79

Sumber : BPS Kab. Halmahera Selatan

2.4.11.2 Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2007-2009 disajikan pada Tabel 2.59. Rasio ini menunjukan keadaan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan yang sedang berkembang. Rasio ini juga merupakan salah satu indikator demografi yang penting.

Tabel 2.60 Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

NO	Uraian	2007	2008	2009
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	76.918	77.253	79.080
2.	Jumlah penduduk usia > 65 tahun	4.753	4.772	3.908
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)+(2)	81.671	82.025	82.988
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	103.280	108.210	111.724
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	**79.08**	**75,80**	**74,28**

Berikut adalah gambaran rasio jumlah murid / guru dan rasio jumlah murid / sekolah berdasarkan jenjang pendidikan baik tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Halmahera Selatan sampai tahun 2009 dapat disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid/Guru di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Sekolah			Murid			Guru			Rasio Murid/Guru			Rasio Murid/Sekolah		
		SD	SMP	SMA/SMK	SD	SMP	SMA/SMK	SD	SMP	SMA/SMK	SD	SMP	SMA/SMK	SD	SMP	SMA/SMK
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[13]	[14]	[15]
1	Obi Selatan	10	7	3	2480	419	332	68	12	15	36,47	34,92	22,13	248,00	59,86	110,67
2	Obi	11	3	2	2435	921	886	101	45	50	24,11	20,47	17,72	221,36	307,00	443,00
3	Obi Barat	4	3	0	793	194	0	11	2	0	72,09	97,00	-	198,25	64,67	0,00
4	Obi Timur	4	2	1	788	111	12	22	2	1	35,82	55,50	12,00	197,00	55,50	12,00
5	Obi Utara	7	2	2	1,246	552	369	59	20	15	0,02	27,60	24,60	0,18	276,00	184,50
6	Bacan	22	6	5	3306	1179	711	180	62	99	18,37	19,02	7,18	150,27	196,50	142,20
7	Mandioli Selatan	7	1	2	1295	382	79	31	5	1	41,77	76,40	79,00	185,00	382,00	39,50
8	Mandioli Utara	5	2	2	799	129	95	25	7	2	31,96	18,43	47,50	159,80	64,50	47,50
9	Bacan Selatan	15	2	1	2117	981	495	93	68	51	22,76	14,43	9,71	141,13	490,50	495,00
10	Kep Batanglomang	8	2	1	1359	343	175	51	6	7	26,65	57,17	25,00	169,88	171,50	175,00
11	Bacan Timur	13	3	2	1748	654	593	75	28	23	23,31	23,36	25,78	134,46	218,00	296,50
12	Bacan Timur Selatan	9	2	1	1617	257	165	35	10	6	46,20	25,70	27,50	179,67	128,50	165,00
13	Bacan Timur Tengah	7	5	2	1242	268	74	52	14	8	23,88	19,14	9,25	177,43	53,60	37,00
14	Bacan Barat	8	3	2	878	142	58	30	5	4	29,27	28,40	14,50	109,75	47,33	29,00
15	Kasiruta Barat	11	1	0	1095	0	0	26	1	0	42,12	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00
16	Bacan Barat Utara	8	2	0	952	83	0	36	7	13	26,44	11,86	0,00	119,00	41,50	0,00
17	Kasiruta Timur	9	1	1	967	0	0	76	4	8	12,72	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00
18	Kayoa	16	4	3	1889	526	627	136	34	18	13,89	15,47	34,83	118,06	131,50	209,00
19	Kayoa Barat	5	2	1	802	349	201	27	4	6	29,70	87,25	33,50	160,40	174,50	201,00
20	Kayoa Selatan	10	6	2	1259	432	347	103	13	7	12,22	33,23	49,57	125,90	72,00	173,50
21	Kayoa Utara	6	1	1	733	84	63	55	5	1	13,33	16,80	63,00	122,17	84,00	63,00
22	Makian	13	9	6	1140	675	724	139	31	47	8,20	21,77	15,40	87,69	75,00	120,67
23	Makian Barat	7	1	2	790	535	319	55	13	21	14,36	41,15	15,19	112,86	535,00	159,50
24	Gane Barat	14	9	2	1686	713	295	91	21	16	18,53	33,95	18,44	120,43	79,22	147,50
25	Gane Barat Selatan	8	0	2	1302	378	105	39	7	4	33,38	54,00	26,25	162,75	0,00	52,50
26	Gane Barat Utara	13	4	2	1450	357	293	72	16	17	20,14	22,31	17,24	111,54	89,25	146,50
27	Kep Joronga	7	2	2	1255	158	209	25	3	1	50,20	52,67	209,00	179,29	79,00	104,50
28	Gane Timur	20	6	2	2123	681	249	85	16	17	24,98	42,56	14,65	106,15	113,50	124,50
29	Gane Timur Tengah	8	3	1	980	150	147	49	6	17	20,00	25,00	8,65	122,50	50,00	147,00
30	Gane Timur Selatan	6	3	1	884	0	98	30	0	6	29,47	0,00	16,33	147,33	0,00	98,00
JUMLAH/Rata-rata		**291**	**97**	**54**	**40165**	**11653**	**7721**	**1877**	**467**	**481**	**21,40**	**24,95**	**16,05**	**138,02**	**120,13**	**142,98**

Sumber : Halsel Dalam Angka 2010